

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Razak, 2021, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam hukum Administrasi Negara*, Litera, Yogyakarta.

Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- undang. Volume 1 Pemahaman Awal*, Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Jakarta; Kencana.

Ahmad Redi, 2014, *Hukum Pertambangan*, Bekasi; Gramata Publishing. Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta; PT. Raja Grafindo,

Angger S. P. & Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Jakarta; Pustaka Yustisia.

Anonom, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet IV, Perum dan Percetakan, Balai Pustaka, Jakarta.

Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Etty Riani, Muhammad Reza Cordova, 2021, *Peran Masyarakat dalam Mencegah Korupsi Sumber Daya Alam : Sektor Kelautan dan Pertambangan*, Cetakan Pertama, Bandung; IPB Press.

Hani Handoko, 1999, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rafika Aditam.

Herman Togatorop, 2020, *Kupas Kejahatan Tambang Timah Bangka Belitung*, Tangerang Selatan; Pustakapedia.

Irham Fahmi, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Dan Aplikasi*. Bandung, Alfa Betha.

Irwandy Arif, 2018, *Nikel Indonesia*, Cetakan. Pertama, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.

Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Cetakan Ke-4, Yogyakarta; Mirra Buana Media.

Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta; Liberty.

Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang; UMM Press.

N.H.T Siahaan, 2006, *Hukum Lingkungan*, Jakarta; Pancuran Alam.

Prianter Jaya Hairi, 2011, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining*, Jakarta.

Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Rajawali Press.

S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.

Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta; Pustaka Belajar. Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta; Sinar Grafika.

Soemarwoto, 2003, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan ke-16, Depok; PT. Rajagrafindo Persada.

Suparto Wijoyo, 2017, *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Airlangga University Press.

Suriansyah Murni, 2008, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta; Laksbang Mediatama.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juihr, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta; PT Rineka Cipta.

Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta; Penerbit Rieneka.

JURNAL

A. Smith, 2023, "Understanding Oversight Theories and Their Practical Implications," *Journal of Management Studies* 45, No.1.

Abdul Razak, 2005, *Peraturan Kebijakan Sebagai Instrumen Pemerintahan*. Jurnal Amannagappa, Vol.13, No.2, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Aditia Syaprillah, 2013, "Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Batubara Di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur)" Universitas Islam Indonesia.

Agung, Muhammad, and Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, 'Peningkatan Hilirisasi Nikel 2022', *Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia*, 6.2 (2022), 4009–20

Ahmad Basuki, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Pejabat atas Tindakan Mal-Administrasi dalam Penerbitan Izin di Bidang Lingkungan*. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. 16, No. 4.

Aldiansyah, S., & Nursalam, L. O. Dampak Pertambangan Nikel Pt.Ifishdeco Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup Di Desa Roraya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, Vol. 4, No. 1.

Angelina, C., Ismail, A., Kristi, A., Febrina, D., & Beneficia, M, 2023, *Analisis Kondisi Sumber Daya Mineral Brown Canyon Semarang*. Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan (JPPL), Vol. 5, No. 2.

Anthony Allot, 1981. *The Effectiveness of Laws*, 15 Val. U. L. Rev. 229. Arief K, Syaifulloh, 2021, Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 2, Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

Deyv Ch. Rumambi, 2014, Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 2, No. 7.

Franky Butar Butar, 2010, Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan. Yuridika, Universitas Airlangga, Vol. 25, No. 2.

Lutfil Ansori, 2015, Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Yuridis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2(1).

Muhammad Jufri Dewa et al., 2022, "Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Izin Pengelolaan Limbah PT. Antam terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Pantai Pomalaa," Halu Oleo Legal Research Vol. 4, No. 2.

Pangestu, M. R., & Ramasari, R. D. 2023, Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Ilegal (Studi Putusan Nomor: 90/Pid. Sus/2021/PN Gdt). Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 5(1).

Siti Sundari Rangkuti, dalam Dahlia Kusuma Dewi et al., 2014, "Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)," USU Law Journal Vol. 2, No. 1.

Slamet Suhartono, 2013, Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2(1).

Samuel Risal., Dan Buntu Paranoan., & Suarta Djaja, 2013, Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman. Jurnal Administrative Reform, Universitas Mulawarman.

Siti Sundari Rangkuti, 2008, "Perangkat Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum, Sekali Lagi, ke Ius Constituendum," disampaikan pada Seminar "Good Governance and Good Environmental Governance" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

WALHI, 2021, "Catatan Akhir Tahun 2021, Red Alert Ekspansi Nikel di Sulawesi," Makassar: WALHI.

Yuli Adha Hamzah, 2017, Hubungan Hukum antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan Pemegang Hak atas Tanah Diatasnya. Al Hikam, Universitas Muslim Indonesia, 4(1),

Zulkifli Aspan, 2017, Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup). Amanna Gappa, Universitas Hasanuddin, 25(2).

Kartowiyono, Kartono, 2017, 'Analisa Konflik Hukum Wewenang Pengawasan Kegiatan Pertambangan Pasca Berlakunya Undang- Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014', *Bina Hukum Lingkungan*, 2.1.

Nugroho, Wahyu, 2020, Persoalan Hukum Penyelesaian Hak Atas Tanah Dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27.3.

Panjuwa, Govinda, 2018, HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UU No.4 Tahun 2009, VI.5.

Puluhulawa, Fenty U., 2011, Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.2.

Syaifulloh, Arief K., 2021, Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi Di Klaten', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2.

Zaidan, M &, W Garinas, 2021, Kajian, Bahan Baku Mineral Nikel, 'Kajian Bahan Baku Mineral Nikel Untuk Baterai Listrik Di Daerah Sulawesi Tenggara', *Jurnal Rekayasa Pertambangan*, 1.1.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Internet

Arga Dirga, *Tahapan Izin Usaha Tambang*, <https://konsultantambang.id/tahapan-izin-usaha-tambang-panduan-lengkap-untuk-memahami-prosesnya/>, diakses pada 25 juni 2024 pukul 16.43 Wita.

Damang Averroes Al-Khawarizmi, 2011, *Teori Pengawasan*, <https://www.negarahukum.com/teori-pengawasan.html>, diakses pada 27 juni 2024, pukul 22.01 Wita.

Damang, *Efektivitas Hukum*, Efektivitas Hukum - NegaraHukum.com, diakses pada 24 juni 2024 pukul 21.27 Wita.